

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran struktur-struktur atau institusi politik di Tingkat Masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa yang kritis juga aktif merupakan satu indikator bahwa keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik itu ada. Jika memahami dengan Insaf dan sadar persoalan aktivitas-aktivitas politik pemerintahan akan memberikan dampak terhadap kehidupan rakyat secara menyeluruh, maka keterlibatan rakyat secara menyeluruh merupakan satu keharusan. Bagi Sebagian kalangan, keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan hanya pada ranah formulasi terhadap kebijakan pemerintah atau terhadap Keputusan yang dikeluarkannya saja, akan tetapi terlibat juga dalam implementasi dari Keputusan atau kebijakan tersebut. (Faturrohman & Sobari, 2004)

Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa; “Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*). (Budiardjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, 1994). Begitu juga Ramlan Surbakti dalam bukunya berpendapat bahwa Partisipasi Politik “ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya. Yang berarti, keikutsertaan tersebut berasal dari warga negara yang tak memiliki wewenang dalam konstitusi, dan kegiatannya tersebut dapat mempengaruhi proses terciptanya kebijakan pemerintah dan Keputusan politik.” (Faturrohman & Sobari, 2004). Michael Rush dan Phillip Althoff juga berpendapat bahwa “partisipasi politik adalah keterlibatan politik dari individu dalam bermacam-macam tingkatan dalam system politik” (Rush, Althoff, & Kartini, 2003). Terakhir menurut Huntington & Nelson, menurut mereka partisipasi politik adalah sebuah kegiatan warga negara yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah. (Nelson & Huntington, 1994).

Secara praktis ada beberapa bentuk dari partisipasi politik tersebut yang peneliti ambil dari berbagai teori mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik, teori-teori berikut yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, antara lain: Pertama adalah apatis. Roth dan Wilson di dalam piramida partisipasinya (Syarbani, 2004) memasukan apatis sebagai salah

satu bentuk partisipasi politik di masyarakat, masyarakat cenderung tidak memilih dan tidak ikut dalam berpartisipasi sama sekali, selain itu Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004), serta Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003) juga menambahkan mengenai bentuk apatis.

Selanjutnya, bentuk yang kedua dalam partisipasi politik adalah partisipasi dalam kegiatan pemilihan. Partisipasi ini berbentuk mengikuti pemilihan umum, bekerja menjadi panitia pemilihan umum, selain itu memberikan sumbangan untuk kampanye, dan mencari dukungan untuk salah satu calon. Bentuk ini dikemukakan oleh beberapa ahli yakni Huntington dan Nelson (Nelson & Huntington, 1994:16), Roth dan Wilson (Syarbani, 2004:24), Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004), serta Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003). Selanjutnya, bentuk ketiga dari partisipasi politik adalah menghubungi pejabat. Menghubungi pejabat disini bertujuan untuk memengaruhi kebijakan tertentu dari tingkat daerah, provinsi sampai dengan nasional. Bentuk keempat ini dikemukakan oleh beberapa ahli yakni Huntington dan Nelson (Nelson & Huntington, 1994) dan Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004).

Bentuk selanjutnya yang keempat adalah partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik. Bentuk ini dikemukakan oleh Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004) yang mengungkapkan ini merupakan bentuk partisipasi politik juga, yakni mencari informasi di media, menulis dalam kolom politik di media, dan juga ikut diskusi informal mengenai kebijakan dan masalah politik. Selain Milbrath ada Roth dan Wilson (Syarbani, 2004), serta Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003) yang mengungkapkan mengenai bentuk partisipasi politik ini. Selanjutnya, yang kelima adalah partisipasi dalam partai politik. Beberapa ahli sepakat partisipasi dalam partai seperti menjadi simpatisan, menjadi anggota partai, menghadiri rapat partai, menyumbang dana pada partai, dan menjadi pengurus partai adalah bentuk partisipasi politik selanjutnya yakni seperti dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994), Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004), dan juga Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003).

Kemudian bentuk yang keenam adalah partisipasi di dalam organisasi politik (non-Partai Politik). Hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli yakni Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003), Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004), Roth dan Wilson (Syarbani, 2004), dan Huntington dan Nelson (Nelson & Huntington, 1994). Maksud organisasi politik (non-Partai politik) disini adalah berupa sebuah LSM/CSO yang bergerak di bidang politik. Partisipasi dalam organisasi politik (non-Parta Politik) ini maksudnya adalah menjadi anggota, ikut dalam diskusi-diskusi formal dalam memberikan sumbangan dana, menjadi pengurus, membentuk organisasi politik. Ketujuh adalah partisipasi politik yang berbentuk proses. Hal

ini seperti mengikuti demonstrasi atau aksi di jalanan, melakukan konfrontasi, mengajukan petisi, melakukan mogok, mengkritisi melalui media. Ahli yang mengungkapkan bentuk partisipasi politik ini antara lain Huntington dan Nelson (Nelson & Huntington, 1994), Milbrath (Faturahman dan Sobari, 2004:191), serta Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003). Terakhir adalah bentuk tertinggi dalam partisipasi politik yakni menduduki jabatan politik seperti dikemukakan oleh Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003) dan juga Roth dan Wilson (Syarbani, 2004).

Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi mengalami beberapa periode, hingga saat ini menjalani periode reformasi. Negara demokrasi, tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Hal ini didasari pada pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan suatu pemerintahan yang keberadaan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) yang sentral dan penting dalam setiap system demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. (Purnamawati, 2020). Dan sejauh ini system demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi Konstitusional, Dimana di dalamnya demokrasi diatur dan dibatasi oleh konstitusi negara yaitu Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Eko, 2003).

Demi terciptanya demokrasi yang baik, maka perlu akan kehadiran dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan suatu perbuatan ketika seseorang atau kelompok terlibat dalam suatu kegiatan politik. Dalam keterlibatan tersebut, individu atau kelompok tersebut haruslah dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan perlu digaris bawahi bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan nyata yang bisa diamati dengan mata telanjang, bukan merupakan sikap dan orientasi. Dan di dalam keterlibatan tersebut pastinya muncul dari rasa sukarela dan bukanlah berdasarkan keterpaksaan semata dari pihak birokrat sendiri ataupun orang lain. (Huntington, 1991).

Dengan demikian, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok untuk ikut serta dalam kegiatan politik secara aktif dan sesuai dengan aturan yang berlaku, pada dasarnya setiap warga Negara memiliki hak dalam berpartisipasi dalam politik, tetapi kadar dari partisipasi politiknya memiliki taraf yang berbeda, semua itu beragkat dari pengetahuan, wawasan dan keinginan dari diri masing-masing individu. (Jarvis, 2005).

Tentunya sudah peneliti sebutkan di atas bahwasannya jika membahas tentang partisipasi politik bukan hanya membahas tentang bagaimana individu ikut serta dalam pemilihan

pemimpin dalam ruang lingkup manapun, baik dalam ruang lingkup kecilnya seperti pemilihan Kepala Desa sendiri, bahkan sampai Pemilihan Presiden (Pilpres), akan tetapi yang bisa disebut dengan partisipasi politik yaitu lebih dari sekedar keikutsertaan dalam memilih dan dipilih, mempengaruhi kebijakan pemerintah demi kepentingan bersama (masyarakat umum) juga merupakan sebuah bentuk dari partisipasi politik. Termasuk di Negara kita Indonesia, yang dimana Negara kita menganut paham sistem Demokrasi, sesuai dengan pengertiannya yaitu dimana masyarakat memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hal yang disebut dengan “kebaikan bersama”. (Huntington, 1991). Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi. Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan system politik demokrasi merupakan hak warga negara, tetapi dalam persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. (Hasbi Wahyudi, 2013)

Sistem Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi dari warga negara. Berdasarkan indeks demokrasi 2019, Indonesia menempati ranking 64, di bawah Malaysia yang berada di ranking 43 dan Partisipasi politik merupakan aktivitas partisipasi warganegara yang berdampak pada pemilihan birokrasi pemerintahan, kebijakan, dan formasi pemerintahan. Partisipasi politik kalangan muda mendapat banyak perhatian dalam studi sebelumnya, karena partisipasi mereka dapat memprediksi kekuatan serangkaian perilaku politik selanjutnya. (Adi Fahrudin, 2012)

Juga perlu di garis bawahi bahwasannya di dalam demokrasi, warga Negara dapat ikut serta secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui perwakilan. Lalu apa peran dari masyarakat umum terhadap sistem demokrasi di Indonesia ini yang menggunakan perwakilan?. Tentu saja disinilah mahasiswa berperan, yang dimana sering sekali bahwa mahasiswa merupakan Agent Of Change, mahasiswa mampu menjadi penggerak perubahan (*Iron Stock*). Disini berhubung mahasiswa dituntut memiliki jiwa intelektual, dan pastinya dengan pengetahuan yang dimilikinya dapat menambah wawasan, mengasah alam pikirannya serta meruncingkan analisis terhadap kondisi sosial yang ada, dengan begitu mahasiswa haruslah mampu menjadi penggerak Agent Of Control. Dan tentunya disini mahasiswa diharapkan dapat menjadi penyambung lidah dari masyarakat sendiri, seperti halnya pergerakan-pergerakan mahasiswa yang pernah dilakukan pada masa lampau dengan turun kejalan melakukan aksi, lobbying dan masih banyak lagi. (Eko, 2003)

Begitupun bagi mahasiswa pastinya jika mengejar terhadap keharusan memanglah harus mampu memiliki wawasan lebih dalam partisipasi politik. Jika berkuat kepada sejarah, para pemuda intelektual banyak sekali melakukan pergerakan/aksi, guna menjalankan perannya dan

mengamalkan pengetahuannya dalam partisipasi politik. Seperti halnya Partisipasi Politik Mahasiswa yang terjadi di tahun 1998 sebuah gerakan besar-besaran yang mengusung akan 6 visi reformasi, gerakan tersebut berhasil karena presiden pada saat itu Soeharto berakhir mengundurkan diri dari ke-presidenannya. Berikut 6 visi reformasi : (1) adili Soeharto dan pengikutnya, (2) amandemen UU 795, (3) Otonomi daerah diperluas, (4) hapus dwifungsi ABRI, (5) hapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (Eko, 2003)

Mahasiswa pada masa kini pastinya harus mampu menyelaraskan antara teknologi dan pengetahuannya yang dia pelajari, karena dengan adanya teknologi harusnya dapat menjadi dampak yang lebih baik. Antara pemikirannya yang kritis, kemudian pengetahuan yang bisa dianggap lebih dari pada golongan pemuda lainnya mahasiswa harus mampu menggunakan teknologi yang makin kian maju ini. Bahkan gerakan massa pada hari ini bukan Cuma hanya pergerakan yang dilakukan di jalan saja, akan tetapi mahasiswa harus bisa meng-*counter* terlebih dahulu terhadap propaganda yang dilakukan media yang merugikan aksi ke jalanan tersebut. (Adi Fahrudin, 2012)

Kampus atau perguruan tinggi merupakan lingkungan yang memiliki sebuah kekhasan dengan masyarakatnya yang disebut sivitas akademik, karena di dalamnya terdapat kegiatan yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler. Masyarakat akademis atau sering kita sebut sebagai mahasiswa merupakan kategori Masyarakat yang memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, dan organisasilah tempat mereka untuk berfikir dan mengembangkan potensinya tersebut. Dan di lingkup perguruan tinggi, kurang lebih ada beberapa organisasi yang masuk ke dalam organisasi Intra Kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (Dewan Mahasiswa) dari Tingkat Universitas sampai Tingkat fakultas, Badan Legislatif (Senat Mahasiswa) dari Tingkat universitas sampai Tingkat fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Lembaga Kegiatan Mahasiswa (LKM). (Hasbi Wahyudi, 2013).

Terlepas daripada organisasi intra kampus, ada juga yang dinamakan dengan organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan masih banyak lagi, sesuai dengan Namanya ekstra kampus, tidak seperti halnya organisasi intra kampus yang memiliki lingkup yang berada di ruang kampus saja, Gilang Ramadhan (2021) berpendapat bahwa organisasi ekstra merupakan sebuah organisasi yang senantiasa memperhatikan dan mengawal setiap kebijakan politik baik negara atau bahkan kampus sekalipun, dan terkhusus di organisasi saya (PMII) senantiasa melakukan sebuah diskusi seputar literatur dan studi kasus guna mempertajam partisipasi politik anggotanya dalam mengawal demokratisasi kampus dan negara. Begitupula M dawa Raihan

berpendapat bahwa Organisasi ekstra kami (HMI) senantiasa melakukan diskusi seputar kebijakan dan politik dalam pengawalan demokrasi dan sebuah bentuk daripada partisipasi politik.

Terlepas dari pada posisi mahasiswa sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) (Eko, 2003), perlu diketahui bahwasannya di dalam ruang lingkup ada yang disebut dengan organisasi intra kampus dan ekstra kampus, terlepas dari pada itu, penulis ingin menitik fokuskan terhadap organisasi ekstra kampus terkhusus di ruang lingkup Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini organisasi ekstra sangatlah terlihat dominan, terlepas daripada kajian-kajian sosial politiknya, mahasiswa yang aktif dalam organisasi ekstra kampus ini selalu menjadi penyambung lidah masyarakat terhadap birokrasi dalam ruang lingkup kampus (masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terhadap birokrasi kampus) maupun ruang lingkup masyarakat (rakyat terhadap pemerintah), Peneliti disini tertarik akan kehadiran organisasi ekstra ini, karena berdasarkan analisis peneliti, bahwa organisasi ekstra senantiasa ikut andil dalam pengawalan isu dan kebijakan yang ada dalam diskusi rutinannya yang biasa dilakukan seminimalnya seminggu sekali, selain daripada itu, organisasi ekstra ini senantiasa hadir dalam perhelatan aksi massa dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di negara ini, salah satunya dalam isu disahkannya Omnibuslaw dan RUU KUHP.

Terlepas daripada banyaknya kegiatan dari mahasiswa yang menjadi organisasi ekstra ini peneliti masih belum percaya betul akan statement mahasiswa ekstra yang seringkali mengadakan diskusi ini benar benar dilaksanakan oleh anggotanya atau tidak, lalu jika dipandang dalam prespektif partisipasi politik dan bentuk-bentuknya yang sudah peneliti sampaikan di atas kiranya sudah sejauh mana partisipasi politiknya?, apakah hanya ikut dalam partisipasi politik seputar aksi Gerakan massa dan diskusi seputar kebijakan pemerintah saja atau bahkan banyak yang ikut serta dalam kegiatan yang lainnya?, juga kiranya indicator apa yang cocok digunakan dalam partisipasi politik mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri ini?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam, kemudian peneliti menuangkannya dalam tulisan ini yang berjudul “Partisipasi Politik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Anggota Organisasi Ekstra Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis rasa permasalahan yang ada saat ini adalah bentuk keseluruhan atau mayoritas partisipasi politik mahasiswa yang dirasa belum terlihat dengan jelas karena dirasa belum ada yang meneliti ke sana, maka dari itu peneliti sendiri mulai meneliti dari bentuk partisipasi politik mahasiswa yang menjadi anggota dalam Ekstra Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

1. Indikator apa saja yang menjadi acuan partisipasi politik mahasiswa yang menjadi anggota dalam Ekstra Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Bandung?
2. Bagaimana bentuk partisipasi politik mahasiswa yang menjadi anggota dalam Ekstra Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Bandung?
3. Sudah sejauh mana partisipasi politik dari mahasiswa yang menjadi anggota dalam Ekstra Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk mengetahui bentuk keseluruhan partisipasi politik mahasiswa dan sudah sejauh mana partisipasi politik ini terlaksana di Program studi yang peneliti teliti, terutama dalam lingkup Ekstra Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang peneliti teliti terdapat 2 aspek

1. Dari sisi akademik

Jika dalam aspek akademik, penelitian ini ada dapat menjadi acuan teman teman yang ingin meneliti seputar partisipasi politik mahasiswa, bukan Cuma itu, penulis berharap tulisan ini dapat menambah kajian pustaka keilmuan di program studi ilmu politik.

2. Dari sisi praktik

Dalam aspek sosial, peneliti harap penelitian ini dapat menjadi refleksi dan evaluasi bersama, sudah sejauh manakah partisipasi politik mahasiswa yang menjadi anggota dalam Ekstra Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Bandung?, apakah kebanyakan hanya diibaratkan monyet yang bermain main kelapa tanpa tahu isinya atukah kita selaku mahasiswa yang menjadi anggota dalam Ekstra

Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Bandung sudah berpartisipasi politik secara aktif?.

1.6 Kerangka Berpikir

Di dalam pemerintahan demokratis, partisipasi politik menjadi indikator dan perwujudan atas legitimasi politik pemerintahan yang ada. Dengan partisipasi politik aktif dari masyarakat menyebabkan pemerintah memiliki legitimasi untuk menjalankan kebijakannya dalam roda pemerintahannya. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara atau sekelompok warga Negara yang bertujuan untuk memilih dan menentukan pemimpin atau penguasa baik melalui proses yang langsung atau tidak langsung serta untuk mempengaruhi sebuah proses pembuatan kebijakan agar sesuai dengan kepentingan warga masyarakat sendiri. Legitimasi menjadi penting agar pemerintahan yang ada di Negara demokrasi mampu menjalankan pemerintahannya sesuai kehendak rakyat yang di dasarkan atas kehendak mayoritas namun, hak-hak minoritas tetap terakomodasi.

Dalam mewujudkan legitimasi politik tersebut, peran berbagai kalangan masyarakat menjadi penting. Termasuk juga mahasiswa. Menurut Shills mahasiswa digolongkan menjadi golongan elit kelas menengah karena tingkat pendidikan yang mereka dapatkan di pendidikan tinggi (Mahasin & Natsir, 1983). Sifat khas mahasiswa tergambar dalam aktivitas mereka seperti aksi-aksi massa, hingga mereka sering dinilai sebagai suatu kekuatan politis yang menentang kekuasaan penguasa. Pada fase ini, seseorang akan mengalami puncak pematangan pemahaman politik sehingga mahasiswa cenderung lekat dengan politik. Selain itu, kesempatan yang lebih banyak dalam keterlibatan di dalam ranah politik menyebabkan peran mahasiswa menjadi signifikan dibandingkan dengan angkatan muda pada umumnya. Di Indonesia sendiri peran mahasiswa dalam setiap era sangat penting sesuai apa yang tercatat dalam sejarah. Namun, pascapergerakan Reformasi 1998, bentuk partisipasi politik mahasiswa cenderung menurun.

Secara praktis ada beberapa bentuk dari partisipasi politik tersebut yang peneliti ambil dari berbagai teori mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik, teori-teori berikut yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian , antara lain: Pertama adalah apatis. Roth dan Wilson di dalam piramida partisipasinya (Syarbani, 2004) memasukan apatis sebagai salah satu bentuk partisipasi politik di masyarakat, masyarakat cenderung tidak memilih dan tidak ikut dalam berpartisipasi sama sekali, selain itu Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004), serta Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003) juga menambahkan mengenai bentuk apatis.

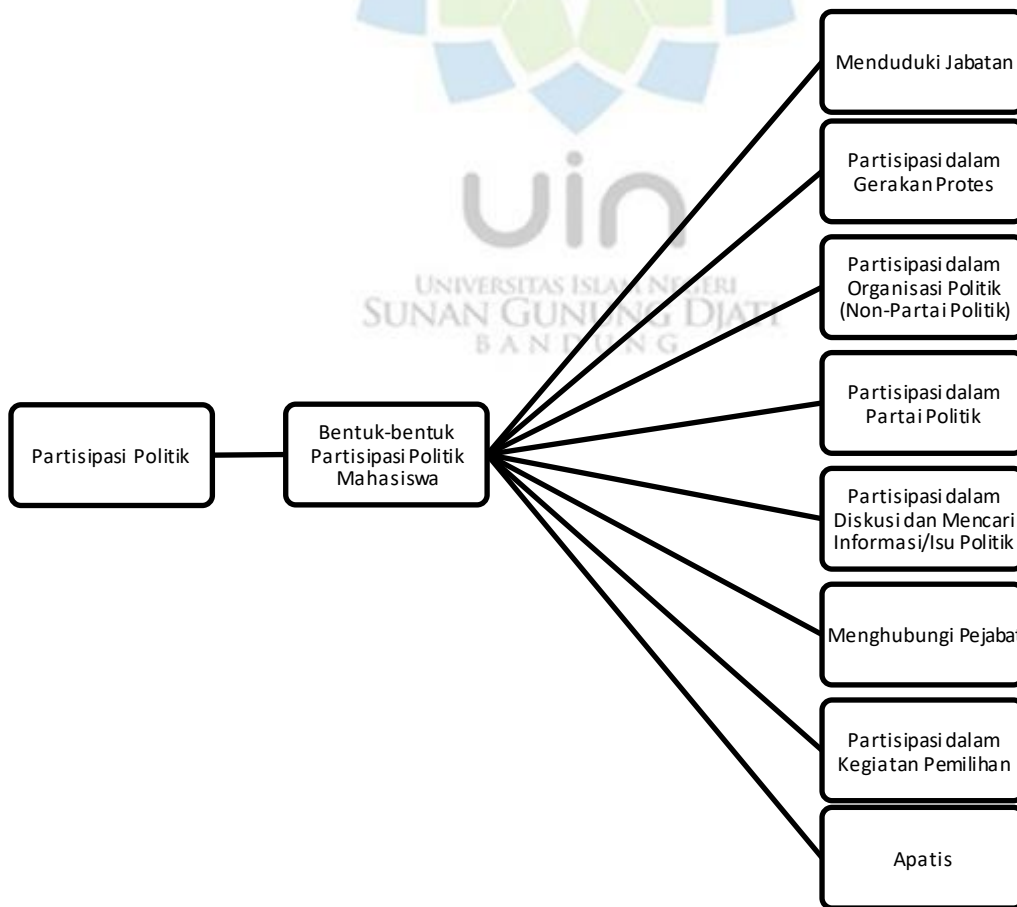
Selanjutnya, bentuk yang kedua dalam partisipasi politik adalah partisipasi dalam kegiatan pemilihan. Partisipasi ini berbentuk mengikuti pemilihan umum, bekerja menjadi panitia pemilihan umum, selain itu memberikan sumbangan untuk kampanye, dan mencari dukungan untuk salah satu calon. Bentuk ini dikemukakan oleh beberapa ahli yakni Huntington dan Nelson (Nelson & Huntington, 1994:16), Roth dan Wilson (Syarbani, 2004:24), Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004), serta Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003). Selanjutnya, bentuk ketiga dari partisipasi politik adalah menghubungi pejabat. Menghubungi pejabat disini bertujuan untuk memengaruhi kebijakan tertentu dari tingkat daerah, provinsi sampai dengan nasional. Bentuk keempat ini dikemukakan oleh beberapa ahli yakni Huntington dan Nelson (Nelson & Huntington, 1994) dan Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004).

Bentuk selanjutnya yang keempat adalah partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik. Bentuk ini dikemukakan oleh Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004) yang mengungkapkan ini merupakan bentuk partisipasi politik juga, yakni mencari informasi di media, menulis dalam kolom politik di media, dan juga ikut diskusi informal mengenai kebijakan dan masalah politik. Selain Milbrath ada Roth dan Wilson (Syarbani, 2004), serta Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003) yang mengungkapkan mengenai bentuk partisipasi politik ini. Selanjutnya, yang kelima adalah partisipasi dalam partai politik. Beberapa ahli sepakat partisipasi dalam partai seperti menjadi simpatisan, menjadi anggota partai, menghadiri rapat partai, menyumbang dana pada partai, dan menjadi pengurus partai adalah bentuk partisipasi politik selanjutnya yakni seperti dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994), Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004), dan juga Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003).

Kemudian bentuk yang keenam adalah partisipasi di dalam organisasi politik (non-Partai Politik). Hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli yakni Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003), Milbrath (Faturrohman & Sobari, 2004), Roth dan Wilson (Syarbani, 2004), dan Huntington dan Nelson (Nelson & Huntington, 1994). Maksud organisasi politik (non-Partai politik) disini adalah berupa sebuah LSM/CSO yang bergerak di bidang politik. Partisipasi dalam organisasi politik (non-Parta Politik) ini maksudnya adalah menjadi anggota, ikut dalam diskusi-diskusi formal dalam memberikan sumbangan dana, menjadi pengurus, membentuk organisasi politik. Ketujuh adalah partisipasi politik yang berbentuk proses. Hal ini seperti mengikuti demonstrasi atau aksi di jalanan, melakukan konfrontasi, mengajukan petisi, melakukan mogok, mengkritisi melalui media. Ahli yang mengungkapkan bentuk partisipasi politik ini antara lain Huntington dan Nelson (Nelson & Huntington, 1994),

Milbrath (Faturohman dan Sobari, 2004:191), serta Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003). Terakhir adalah bentuk tertinggi dalam partisipasi politik yakni menduduki jabatan politik seperti dikemukakan oleh Rush dan Althoff (Rush, Althoff, & Kartini, 2003) dan juga Roth dan Wilson (Syarbani, 2004).

Pendekatan yang peneliti pakai dalam bentuk-bentuk partisipasi politik ini adalah pendekatan yang tidak hirarki. Pendekatan hirarki sendiri sudah ditinggalkan dalam konteks kontemporer saat ini. Selain itu, penggunaan pendekatan yang non-hirarki ini juga mengikuti relevansi terhadap objek penelitian yakni mahasiswa. Jika memakai pendekatan hirarki peneliti menganggap akan membatasi jawaban-jawaban dari objek penelitian. Kemudian semua konsep bentuk partisipasi politik sendiri menurut peneliti sangat relevan dengan keadaan mahasiswa. Pada bentuk terakhir pun seperti menduduki jabatan politik, tidak menutup kemungkinan adanya mahasiswa yang melakukan bentuk partisipasi politik tersebut. Sebab, sebagaimana diatur undang-undang salah satunya persyaratan dalam mencalonkan menjadi anggota legislatif adalah berusia 21 tahun yang termasuk dalam rentang usia mahasiswa.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

(Sumber Pengolahan Peneliti)

1.7 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan instrument penelitian yang dipaparkan oleh peneliti. Maka, hipotesis penelitian ini yaitu bentuk partisipasi mahasiswa yang mengikuti organisasi ekstra di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) adalah apatis, partisipasi dalam kegiatan pemilihan, menghubungi pejabat, partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik, partisipasi dalam partai politik, partisipasi dalam organisasi politik (non-Partai Ilmu Politik), partisipasi dalam gerakan protes/aksi, dan menduduki jabatan politik. Peneliti disini sudah beranggapan jika tingkatan partisipasi politik akan semakin tinggi sesuai dengan pengetahuan politiknya, maka bisa asumsikan bahwa Partisipasi Politik Mahasiswa yang mengikuti Organisasi Ekstra di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini sudah mencapai pada fase aktivis, dimana mereka bukan hanya ikut serta dalam pemilihan saja, tetapi ikut dalam gerakan protes/aksi, mengikuti organisasi politik dan berpartisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik

